



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2024-2026

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan berkat dan rahmat-Nya sehingga dapat diselesaikannya penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2024-2026.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 mengamanatkan bagi seluruh daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan berakhirnya masa jabatan pada tahun 2022 atau 2023 untuk melakukan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Hal tersebut menjadi dasar bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan untuk melakukan Penyusunan Renstra Tahun 2024-2026.

Penyusunan sistematika dokumen Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2024-2026 telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sedangkan dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan telah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Akhirnya diharapkan dokumen Renstra selanjutnya dapat menjadi salah satu pedoman perencanaan strategis dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan penyelenggaraan manajemen kepegawaian sebagai langkah mendukung program pembangunan Kalimantan Barat dengan meningkatkan mutu dan kualitas aparatur sipil negara di Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, 2023
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Barat,



Drs. ANI SOFIAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650602 198603 1 018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II.....	6
GAMBARAN PELAYANAN DAERAH	6
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	6
B.1. Kepala Badan	8
B.2. Sekretariat.....	9
B.3. Bidang Pengadaan dan Mutasi Aparatur Sipil Negara	12
B.4. Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara	13
B.5. Bidang Data, Disiplin, dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara.....	15
B.6. Kelompok Jabatan Fungsional.....	16
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	17
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
BAB III.....	59
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	59
PERANGKAT DAERAH	59
3.1. Permasalahan Pelayanan	59
3.2. Isu Strategis.....	60

BAB IV.....	61
TUJUAN DAN SASARAN.....	61
4.1. Tujuan Jangka Menengah.....	61
4.2. Sasaran Jangka Menengah	63
BAB V.....	66
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	66
5.1. Strategi.....	66
5.2. Arah Kebijakan	67
BAB VI.....	68
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	68
BAB VII.....	70
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	70
BAB VIII.....	73
PENUTUP.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi PNS BKD Prov. Kalbar Tahun 2022.....	18
Tabel 2. Kondisi Sarana dan Prasarana.....	18
Tabel 3. Pencapaian Kinerja BKD Prov. Kalbar 2018-2021	21
Tabel 4. Realisasi Anggaran BKD Prov. Kalbar 2018-2021.....	58
Tabel 5. Tujuan dan Indikator Tujuan Tahun 2024-2026	61
Tabel 6. Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2024-2026.....	63
Tabel 7. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BKD Prov. Kalbar	7
--	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	74
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari amanat Instruksi Mendagri nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 untuk daerah yang akhir jabatan Kepala Daerah nya pada tahun 2023. Renstra adalah suatu alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk proyeksi kondisi pada masa depan yang pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan proses yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan.

Proses penyusunan Renstra telah melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Penyusunan RPJMD Provinsi menjadi pedoman RKPD dan Renstra Perangkat Daerah dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2024-2026 juga telah menyesuaikan perubahan terhadap nomenkelatur program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta indikator kerjanya.

1.2. Landasan Hukum

Adapun dasar hukum yang melandasi Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2024-2026 antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- f. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- h. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.
- i. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- j. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 dimaksudkan agar Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai pedoman perencanaan strategis dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien serta mampu mendorong peningkatan profesionalisme aparatur yang disesuaikan dengan kondisi kepegawaian saat ini dimana semakin banyaknya penyesuaian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Tujuan Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 antara lain :

- a. Menetapkan kebijakan strategis jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. Menyediakan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan
- c. Menentukan strategi untuk pencapaian keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan kinerja serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika yang terdiri dari 8 (delapan) bab yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud tujuan dan sistematika penulisan penyusunan Renstra

BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kalimantan Barat, Sumber Daya yang dimiliki, Kinerja Pelayanan, dan Tantangan serta Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat

BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah serta isu-isu strategis yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan.

BAB IV : Tujuan dan Sasaran

Dalam Bab ini dipaparkan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan.

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam Bab ini diuraikan upaya-upaya berupa strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

BAB VI : Rencana Program / Kegiatan / dan Sub Kegiatan

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menjelaskan indikator kinerja yang akan dicapai dalam tiga Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII : Penutup

Bab ini memuat harapan yang ingin dicapai terkait penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai lembaga teknis dari perangkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang bertugas membantu Gubernur untuk merumuskan kebijakan teknis di Bidang Kepegawaian, yang ditetapkan pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); serta Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 136).

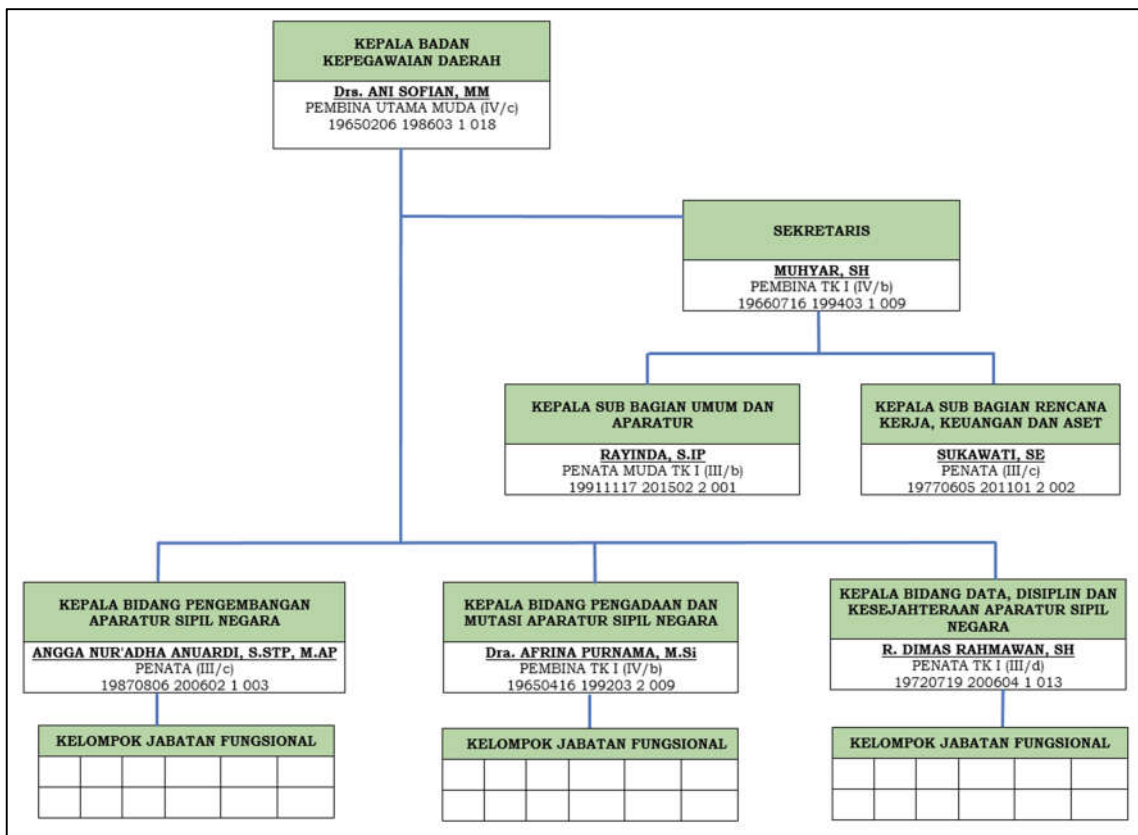
Pergantian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat didasari oleh ketentuan tentang penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa peyetaraan jabatan dilakukan pada instansi Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat memiliki tugas utama dalam mewujudkan manajemen kepegawaian daerah yang handal, menciptakan aparatur PNS yang bermoral, professional, netral, berwawasan global, dan menjadi perekat persatuan dan kesatuam bangsa serta sejahtera jasmani dan rohani.

A. Struktur Organisasi

Berikut struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 136).

Gambar 1. Struktur Organisasi BKD Prov. Kalbar



B. Tugas dan Fungsi

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi antara lain :

- a. Perumusan program kerja di bidang kepegawaian daerah;

- b. Perumusan kebijakan di bidang pengadaan dan mutasi Aparatur Sipil Negara, pengembangan Aparatur Sipil Negara, serta data disiplin dan KORPS Aparatur Sipil Negara;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan dan mutasi aparatur sipil Negara, pengembangan Aparatur Sipil Negara, serta data, disiplin dan KORPS Aparatur Sipil Negara;
- d. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang kepegawaian daerah;
- e. Penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kepegawaian Daerah;
- h. Pelaksanaan administrasi Badan Kepegawaian Daerah;
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang kepegawaian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

B.1. Kepala Badan

Mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan badan di bidang kepegawaian sesuai peraturan perundangundangan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. penetapan program kerja di bidang pengadaan dan mutasi ASN, pengembangan ASN, serta data, disiplin, kesejahteraan ASN;
- b. perumusan kebijakan di bidang pengadaan dan mutasi ASN, pengembangan ASN, serta data, disiplin, kesejahteraan ASN;

- c. penyelenggaraan kegiatan di bidang pengadaan dan mutasi ASN, pengembangan ASN, serta data, disiplin, kesejahteraan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan kegiatan di bidang pemetaan potensi dan penilaian kompetensi bagi ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang pengadaan dan mutasi ASN, pengembangan ASN, serta data, disiplin, kesejahteraan ASN;
- f. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pengadaan dan mutasi ASN, pengembangan ASN, serta data, disiplin, kesejahteraan ASN;
- g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BKD;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan BKD;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang pengadaan dan mutasi ASN, pengembangan ASN, serta data, disiplin, kesejahteraan ASN;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang pengadaan dan mutasi ASN, pengembangan ASN, serta data, disiplin, kesejahteraan ASN; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian daerah yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B.2. Sekretariat

Dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di

lingkungan BKD. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan BKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan BKD;
- e. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan BKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- h. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan BKD;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BKD; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris membawahi **Subbag Rencana Kerja, Keuangan, dan Aset** yang bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Subbagian Rencana Kerja, Keuangan, dan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan BKD;
- c. pelaksanaan urusan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang rencana kerja, keuangan dan aset yang diserahkan oleh sekretaris.

Subbag Umum dan Aparatur yang bertugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur di lingkungan BKD;

- c. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris

B.3. Bidang Pengadaan dan Mutasi Aparatur Sipil Negara

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, mutasi, pemberhentian, dan kepangkatan ASN, fasilitasi seleksi penerimaan siswa/siswi pendidikan kedinasan, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengadaan dan mutasi ASN.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, mutasi, pemberhentian, dan kepangkatan ASN, fasilitasi seleksi penerimaan siswa/siswi pendidikan kedinasan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, mutasi, pemberhentian, dan kepangkatan ASN, fasilitasi seleksi

- penerimaan siswa/siswi pendidikan kedinasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, mutasi, pemberhentian, dan kepangkatan ASN, fasilitasi seleksi penerimaan siswa/siswi pendidikan kedinasan;
 - e. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, mutasi, pemberhentian, dan kepangkatan ASN, fasilitasi seleksi penerimaan siswa/siswi pendidikan kedinasan;
 - f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, mutasi, pemberhentian, dan kepangkatan ASN, fasilitasi seleksi penerimaan siswa/siswi pendidikan kedinasan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, mutasi, pemberhentian, dan kepangkatan ASN, fasilitasi seleksi penerimaan siswa/siswi pendidikan kedinasan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, mutasi, pemberhentian, dan kepangkatan ASN, fasilitasi seleksi penerimaan siswa/siswi pendidikan kedinasan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang pengadaan dan mutasi ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B.4. Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan potensi, analisis kebutuhan diklat, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional dan assesment, pengadaan jabatan fungsional, serta

bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengembangan ASN.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan potensi, analisis kebutuhan diklat, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional dan assesment, pengadaan jabatan fungsional;
- c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengembangan potensi, analisis kebutuhan diklat, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional dan assesment, pengadaan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pemetaan potensi dan penilaian kompetensi bagi ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengembangan potensi, analisis kebutuhan diklat, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional dan assesment, pengadaan jabatan fungsional;
- f. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan potensi, analisis kebutuhan diklat, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional dan assesment, pengadaan jabatan fungsional;
- g. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan potensi, analisis kebutuhan diklat, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional dan assesment, pengadaan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan potensi, analisis kebutuhan diklat, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional dan assesment, pengadaan jabatan fungsional;

- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan potensi, analisis kebutuhan diklat, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional dan assesment, pengadaan jabatan fungsional; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang pengembangan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B.5. Bidang Data, Disiplin, dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang data, sistem dan informasi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kepegawaian kabupaten/kota, disiplin dan kedudukan hukum ASN, kesejahteraan dan Korps ASN, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang data, disiplin dan kesejahteraan ASN.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan ASN;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang data, sistem dan informasi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kepegawaian kabupaten/kota, disiplin dan kedudukan hukum ASN, kesejahteraan dan Korps ASN;
- c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang data, sistem dan informasi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kepegawaian kabupaten/kota, disiplin dan kedudukan hukum ASN, kesejahteraan dan Korps ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. pelaksanaan fasilitasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang data, sistem dan informasi ASN di lingkungan Pemerintah

- Provinsi Kalimantan Barat, kepegawaian kabupaten/kota, disiplin dan kedudukan hukum ASN, kesejahteraan dan Korps ASN;
- f. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang data, sistem dan informasi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kepegawaian kabupaten/kota, disiplin dan kedudukan hukum ASN, kesejahteraan dan Korps ASN;
 - g. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang data, sistem dan informasi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kepegawaian kabupaten/kota, disiplin dan kedudukan hukum ASN, kesejahteraan dan Korps ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang data, sistem dan informasi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kepegawaian kabupaten/kota, disiplin dan kedudukan hukum ASN, kesejahteraan dan Korps ASN;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang data, sistem dan informasi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kepegawaian kabupaten/kota, disiplin dan kedudukan hukum ASN, kesejahteraan dan Korps ASN; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang data, disiplin dan kesejahteraan ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan

B.6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu serta berdasarkan hasil penyetaraan jabatan.

Kelompok jabatan fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki

keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Kelompok jabatan fungsional yang diangkat melalui penyetaraan jabatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur berdasarkan formasi melalui analisis jabatan dimana saat ini dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat terdapat 4 (empat) jenis jabatan fungsional, yaitu jabatan fungsional **analisis kepegawaian**, jabatan fungsional **asesor**, jabatan fungsional **pranata komputer** dan jabatan fungsional **arsiparis**.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana termuat di dalam Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 136 Tahun 2021, BKD Provinsi Kalbar telah memiliki berbagai sumber daya yang dipandang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah dirancang guna mengembangkan potensi yang dimiliki oleh sumber daya pemerintahan daerah di Provinsi Kalbar.

Namun diakui pula bahwa sumber daya yang dimiliki tersebut masih membutuhkan berbagai penyempurnaan agar dapat dimanfaatkan secara optimal guna melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian. Adapun sumber daya yang dimiliki antara lain :

A. Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka mengoptimalkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, BKD Provinsi Kalbar didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang masih dipekerjakan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan kepegawaian yang berlaku.

Sampai dengan dokumen ini diselesaikan penyusunannya, BKD Provinsi Kalbar memiliki 89 orang pegawai yang terdiri dari 77 orang PNS dan 12 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tenaga Kontrak.

PNS yang ada di lingkungan BKD Provinsi Kalbar terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

Tabel 1. Komposisi PNS BKD Prov. Kalbar Tahun 2022

Jenis Kelamin	Eselon			Pangkat / Gol				Tingkat Pendidikan				Jumlah Pegawai
	II	III	IV	I	II	III	IV	SMA	D3	S1	S2	
Laki-Laki	1	3	0	0	4	27	6	9	2	12	14	37
Perempuan	0	1	2	0	2	37	1	4	9	22	5	40
Total	1	4	2	0	6	64	7	13	11	34	19	77

B. Sumber Daya Asset

Dari sisi sarana dan prasarana Badan Kepegawaian Daerah menempati salah satu gedung dalam lingkup Kantor Gubernur Kalimantan Barat dengan menempati 2 (dua) lantai yaitu lantai 1 dan lantai 3 pada gedung sayap kanan lingkup Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Tabel 2. Kondisi Sarana dan Prasarana Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar Tahun 2022

No	Jumlah barang	Nama Barang	Kondisi
1.	37	Printer	Baik
	1	Printer	Rusak
2.	44	P.C Unit	Baik
3.	11	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Baik
4.	54	Kursi	Baik
5.	39	Meja	Baik
6.	18	Lemari	Baik
7.	29	AC	Baik
8.	4	Thermo Gun	Baik
9.	30	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Baik
10.	3	Dispenser	Baik
11.	2	Mic Conference	Baik
12.	5	Tikar	Baik

No	Jumlah barang	Nama Barang	Kondisi
13.	9	Note Book	Baik
14.	11	Lap top	Baik
15.	3	Lambang Garuda Pancasila	Baik
16.	3	Gorden	Baik
17.	1	Handy Cam	Baik
18.	1	Alat Penghancur Kertas	Baik
19.	1	Kamar/Bilik Disinfektan	Baik
20.	1	LCD Projector/Infocus	Baik
21.	2	Bak/Wastafel Cuci Tangan	Baik
22.	6	Televisi	Baik
23.	1	Brankas	Baik
24.	2	Monitor	Baik
25.	1	Amplifiler	Baik
26.	2	Sepeda Motor	Baik
27.	2	Voice Recorder	Baik
28.	2	External	Baik
29.	1	Local Area Network (LAN)	Baik
30.	1	Server	Baik
31.	1	Lemari Es	Baik
32.	2	Station Wagon	Baik
33.	500	Alat Tes (Intelegensi)	Baik
34.	500	Alat Tes (Wartegg Grafis)	Baik
35.	100	Alat Tes (tiki)	Baik

Sumber : BKD Prov. Kalbar, 2022.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Urusan Kepegawaian oleh Badan Kepegawaian Daerah Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada periode sebelumnya (tahun 2013-2018) ditetapkan dengan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama dalam Perencanaan Strategis BKD periode Tahun 2013-2018 mengalami beberapa kali perubahan karena target kinerja indikator telah tercapai dan perlu revaluasi untuk menentukan kembali indikator kerjanya. Capaian kinerja selama periode 2013- 2018 tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. Pencapaian Kinerja BKD Prov. Kalbar 2018-2022

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
Periode 1														
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran (persen)	100	100	-	-	-	100	100	-	-	100	100	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat (paket)	100	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa pelayanan telpon dan internet (bulan)	12	1	-	-	-	12	1	-	-	100	100	-
	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran pajak kendaraan dinas (unit)	2	6	-	-	-	2	6	-	-	100	100	-
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jumlah materai (buah)	1000	2	-	-	-	1000	2	-	-	100	100	-
	Penyediaan Alat Tulis kantor	Jenis-jenis ATK BKD Prov. Kalbar (jenis)	54	54	-	-	-	54	54	-	-	100	100	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis-jenis belanja cetak dan penggandaan keperluan kantor (jenis)	30	2	-	-	-	30	2	-	-	100	100	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	jumlah alat listrik dan elektronik (jenis)	5	5	-	-	-	5	5	-	-	100	100	-
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	8	8	-	-	-	8	8	-	-	100	100	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga (jenis)	12	21	-	-	-	12	21	-	-	100	100	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya surat kabar atau majalah (eksemplar)	8030	2	-	-	-	8030	2	-	-	100	100	-
	Penyediaan Makanan dan Minuman	makanan dan minuman untuk tamu dan peserta rapat (orang)	850	6	-	-	-	850	6	-	-	100	100	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
	Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Laporan perjalanan dinas dalam, luar daerah, dan luar negeri (laporan)	70	25	-	-	-	70	25	-	-	100	100	-
	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/ Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Tersedianya jasa tenaga kontrak (orang)	12	12	-	-	-	12	12	-	-	100	100	-
	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya jasa tata usaha keuangand an barang (orang)	13	13	-	-	-	13	13	-	-	100	100	-
	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya jasa publikasi / iklan dan dokumentasi (spanduk)	4	10	-	-	-	4	10	-	-	100	100	-
	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Tertatanya arsip kantor (arsip)	500	200	-	-	-	500	200	-	-	100	100	-
	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Updating informasi tentang kepegawaian (bulan)	12	12	-	-	-	12	12	-	-	100	100	-
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur (persen)	100	100	-	-	-	100	100	-	-	100	100	-
	Pengadaan AC / Kipas Angin	Tersedianya AC/Kipas angin ruangan (unit)	10	-	-	-	-	10	-	-	-	100	-	-
	Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor	Tersedianya perlengkapan/peralatan kantor (unit)	6	4	-	-	-	6	4	-	-	100	100	-
	Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga	Tersedianya perlengkapan/peralatan Rumah tangga (unit)	2	1	-	-	-	2	1	-	-	100	100	-
	Pengadaan Sarana dan Prasaran Sistem Informasi	Website informasi BKD Prov. Kalbar (apikasi)	1	-	-	-	-	1	-	-	-	100	-	-
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional	Layanan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional (unit)	2	3	-	-	-	2	3	-	-	100	100	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
	Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas Angin (unit)	84	84	-	-	-	84	84	-	-	100	100	-
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan komputer dan printer kantor Unit)	78	78	-	-	-	78	78	-	-	100	100	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi (unit)	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	100	-
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sistem Informasi (server)	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	100	-
	Pengembangan Sistem Informasi	Terlaksanakanya pengembangan sistem informasi (aplikasi)	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	100	-
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin aparatur (persen)	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-
	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya (stel)	-	77	-	-	-	-	77	-	-	-	100	-
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur (persen)	100	100	-	-	-	100	100	-	-	100	-	-
	Pendidikan dan pelatihan	Pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan formal PNS di lingkungan BKD Prov. Kalbar (orang)	3	10	-	-	-	3	10	-	-	100	100	-
	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Keikutsertaan Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop (orang)	15	15	-	-	-	15	15	-	-	100	100	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	PAK Pejabat fungsional analis kepegawaian yang telah dilakukan penilaian (dokumen)	10	12	-	-	-	10	12	-	-	100	100	-
	Penyusunan Analisis Jabatan	Tersedianya dokumen Anjab BKD Prov. Kalbar (dokumen)	1	-	-	-	-	1	-	-	-	100	-	-
	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD (dokumen)	1	2	-	-	-	1	2	-	-	100	100	-
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Dokumen SOP BKD Prov. Kalbar (dokumen)	1	-	-	-	-	1	-	-	-	100	-	-
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (persen)	100	100	-	-	-	100	100	-	-	100	100	-
	Penyusunan laporan keuangan	Penyusunan laporan semester I dan II keuangan BKD (dokumen)	2	1	-	-	-	2	1	-	-	100	100	-
	Penyusunan LAKIP	Dokumen LAKIP BKD (dokumen)	2	1	-	-	-	2	1	-	-	100	100	-
	Penyusunan RENSTRA	Dokumen RENSTRA BKD 2018-2023 (dokumen)	1	-	-	-	-	1	-	-	-	100	-	-
	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan Renja BKD Prov. Kalbar (dokumen)	1	1	-	-	-	1	1	-	-	100	100	-
	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan Dokumen LPPD dan LKPJ BKD (dokumen)	1	2	-	-	-	1	2	-	-	100	100	-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Penyusunan laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (dokumen)	1	1	-	-	-	1	1	-	-	100	100	-
	Penyusunan RKA SKPD dan DPA	Penyusunan RKA dan	2	4	-	-	-	2	4	-	-	100	100	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
	SKPD	DPA BKD (dokumen)												
	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran (dokumen)	1	1	-	-	-	1	1	-	-	100	100	-
	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Layanan informasi pelayanan kepegawaian (bulan)	1	1	-	-	-	1	1	-	-	100	100	-
	PROGRAM LAYANAN ADMINISTRASI DAN INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA	Persentase Layanan Administrasi dan Informasi yang diberikan (persen)	75	100	-	-	-	94,22	113,15	-	-	126	113,15	-
	Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Golong IVa Keatas Pemkot/Pemkab	Jumlah SK kenaikan pangkat PNS Gol. IV keatas dilingkungan Pemkot/Pemkab se-Kalimantan Barat (sk)	600	450	-	-	-	1073	1025	-	-	179	227,78	-
	Pelayanan Administrasi Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun	SK kenaikan pangkat pengabdian dan SK Pensiun (sk)	350	350	-	-	-	342	359	-	-	98	102,57	-
	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	Data SAPK di lingkungan Pemprov. Kalbar (pns)	11588	11062	-	-	-	11588	11062	-	-	100	100	-
	Penyelesaian SKP Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemprov.Kalbar	Terlaksananya fasilitasi penyusunan SKP PNS (berkas)	11588	11062	-	-	-	11588	9909	-	-	100	89,577	-
	Rekonsiliasi Data Berkala Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg)	Rekonsiliasi Data Simpeg secara berkala (pns)	11588	11062	-	-	-	11588	11062	-	-	100	100	-
	Pembuatan Profil Kepegawaian dilingkungan Pemprov.Kalbar	Profil Kepegawaian (jenis)	2	2	-	-	-	2	2	-	-	100	100	-
	Pemutahiran Data Sistim Informasi Manajemen	Data PNS Pemprov. Kalbar (pns)	11588	11062	-	-	-	11588	11062	-	-	100	100	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
	Kepegawaian dilingkungan Pemprov.Kalbar													
	Penyelesaian Mutasi Pindah PNS dan Alih Jenis Kepegawaian	Proses penyelesaian administarsi pindah PNS dan alih jenis (sk)	400	400	-	-	-	346	346	-	-	87	86,5	-
	Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala	Penetapan kenaikan gaji berkala (KGB) PNS golongan ruang III/d keatas PNS di lingkungan Pemprov. Kalbar (sk)	1000	1000	-	-	-	1922	1980	-	-	192	198	-
	Penataan Naskah dan Pemeliharaan Dokumen PNS	Dokumen kepagawaian PNS di lingkungan Pemprov. Kalbar yang tertata dan terpelihara (Dokumen)	11588	11062	-	-	-	11588	11062	-	-	100	100	-
	Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	SK kenaikan pangkat PNS di lingkungan Pemprov. Kalbar (sk)	1400	1250	-	-	-	1855	1186	-	-	133	94,88	-
	Pemberkasan dan Penetapan Nomor Induk Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemprov.Kalbar	Terselesaikannya penetapan NIP CPNS Prov. Kalbar (cpns)	334	300	-	-	-	344	345	-	-	103	115	-
	Penyelesaian Administrasi Karis/Karsu PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	Usulan karis/karsu (kartu)	300	300	-	-	-	312	316	-	-	104	105,33	-
	Sistem Pelayanan Kepegawaian Berbasis Elektronik	Terlaksananya pelayanan Kepegawaian Berbasis Elektronik (sistem)	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	100	-
	Perubahan Status CPNS Menjadi PNS	SK perubahan CPNS Menjadi PNS (sk)	-	367	-	-	-	-	333	-	-	-	90,736	-
	Penerbitan Kartu Pegawai (Karpeg) PNS Prov. Kalbar	Terbitnya Kartu Pegawai (Karpeg) PNS Prov. Kalbar (kartu)	-	367	-	-	-	-	367	-	-	-	100	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
	PROGRAM PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA	Persentase Pembinaan Aparatur Sipil Negara (persen)	100	100	-	-	-	400,33	113,69	-	-	400	113,69	-
	Pelepasan PNS yang memasuki Masa Pensiun	Jumlah PNS yang memasuki masa pensiun (orang)	250	-	-	-	-	250	-	-	-	100	-	-
	Pembekalan Menjelang Purna Tugas	Terselenggaranya pembekalan bagi PNS menjelang purna tugas (orang)	150	-	-	-	-	150	-	-	-	100	-	-
	Pembinaan Rohani PNS	PNS yang diberi pembinaan (orang)	135	-	-	-	-	135	-	-	-	100	-	-
	Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Rekomendasi dan keputusan penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS (kasus)	12	10	-	-	-	3	11	-	-	25	110	-
	Penertipan Disiplin Aparatur Pemerintah Prov.Kalbar	Inspeksi/penertiban disiplin PNS (opd)	45	45	-	-	-	45	47	-	-	100	104,44	-
	Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (laporan)	60	900	-	-	-	1006	1086	-	-	1.677	120,67	-
	Penyelesaian pengusulan dan penyerahan penghargaan kepada PNS yang menerima Satya Lencana Satya Karya	Pemberian penghargaan tanda kehormatan satya lencana karya satya (kali)	2	-	-	-	-	2	-	-	-	100	-	-
	Penyelesaian permohonan izin perceraian PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	Surat keputusan Gubernur Kalbar (sk)	15	15	-	-	-	15	20	-	-	100	133,33	-
	Perumusan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan PNS	Rumusan kebijakan kesejahteraan PNS (dokumen)	1	1	-	-	-	1	1	-	-	100	100	-
	Sosialisasi Pemberhentian PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	Peserta workshop pemberhentian PNS di lingkungan Pemprov.	51	-	-	-	-	51	-	-	-	100	-	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
		Kalbar (orang)												
	PROGRAM PENGAMBANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR SIPIIL NEGARA	Persentase Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM ASN (persen)	100	100	-	-	-	116,74	139,56	-	-	117	139,56	-
	Pelaksanaan Sidang/Rapat BAPERJAKAT	Sidang/rapat BAPERJAKAT (kali)	7	7	-	-	-	7	5	-	-	100	71,429	-
	Penyelesaian Administrasi PNS Tugas Belajar dilingkungan Pemprov.Kalbar	Fasilitasi administrasi bantuan beasiswa bagi PNS yang mengikuti tugas belajar di lingkungan Pemprov. Kalbar (orang)	26	11	-	-	-	19	14	-	-	73	127,27	-
	Monitoring dan Evaluasi Praja IPDN disetiap Kampus Pusat dan Daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Praja IPDN di setiap regional (lokasi)	2	-	-	-	-	2	-	-	-	100	-	-
	Pelaksanaan Pelantikan dan Pengembalian Sumpah/Janji Jabatan Struktural	Acara pelantikan dan pengambilan sumpah / janji jabatan (kali)	6	8	-	-	-	6	12	-	-	100	150	-
	Penyelesaian Administrasi dan Koordinasi pengembangan Jabatan Fungsional	Keputusan tentang pengangkatan / pembebasan sementara / pemberhentian / kenaikan jabatan / pengukuhan / penyesuaian tunjangan dan penetapan angka kredit pejabat fungsional (orang)	400	400	-	-	-	514	590	-	-	129	147,5	-
	Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Pendidikan Kader Aparatur Pemerintah Daerah	Terlaksananya fasilitasi pendidikan kader aparatur pemerintah	18	-	-	-	-	18	-	-	-	100	-	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
		daerah (orang)												
	Penyelesaian Administrasi PNS Ijin Belajar di Lingkungan Pemprov.Kalbar	Terfasilitasinya urusan administrasi dan bantuan ijin belajar bagi PNS Pemprov. Kalbar (orang)	14	24	-	-	-	40	24	-	-	286	100	-
	Fasilitasi Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalbar	Terfasilitasinya Dewan Pengurus Provinsi KORPRI (laporan)	1	2	-	-	-	1	2	-	-	100	100	-
	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dilingkungan Pemprov.Kalbar	Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi (kali)	6	6	-	-	-	6	10	-	-	100	166,67	-
	Seleksi, Penetapan dan pemberangkatan PNS untuk Tugas Belajar	Pelaksanaan program fasilitasi tugas belajar melalui seleksi, penetapan dan pemberangkatan PNS untuk tugas belajar (orang)	3	25	-	-	-	5	0	-	-	167	0	-
	Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN	Seleksi penerimaan calon praja IPDN (orang)	40	0	-	-	-	40	35	-	-	100	#DIV/0!	-
	Perumusan Kebijakan Pengembangan Kelembagaan KORPRI Prov.Kalbar	Terfasilitasinya kebijakan pengembangan kelembagaan (dokumen)	1	1	-	-	-	1	1	-	-	100	100	-
	Workshop Jabatan Fungsional	Workshop tim penilai jabatan fungsional (persen)	100	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-
	Penyelesaian Administrasi dan Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II	Pelaksanaan fasilitasi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi pejabat struktural di lingkungan Pemprov.	6	-	-	-	-	6	-	-	-	100	-	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
		Kalbar (orang)												
	Pembekalan Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemprov.Kalbar	Peseta pembekalan tentang kepegawaian kepada CPNS di lingkungan Pemprov. Kalbar (orang)	334	-	-	-	-	334	-	-	-	100	-	-
	Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional	Acara pelantikan dan pengambilan sumpah / janji jabatan fungsional (kali)	4	3	-	-	-	4	3	-	-	100	100	-
	Penyelesaian Administrasi Peningkatan Pendidikan PNS dilingkungan Pemerintah Pemprov.Kalbar	SK penetapan penyesuaian gelar pendidikan PNS (sk)	25	20	-	-	-	25	40	-	-	100	200	-
	Monitoring dan Evaluasi PNS Tugas Belajar	Terlaksananya monitoring dan evaluasi perkembangan studi PNS tugas belajar (persen)	100	100	-	-	-	100	100	-	-	100	100	-
	Fasilitasi Pekan Olah Raga Nasional KORPRI	Terfasilitasinya Pornas Korpri (laporan)	1	-	-	-	-	1	-	-	-	100	-	-
	Fasilitasi Peyelesaian Administrasi dan Alih Jenis Kepegawaian Lulusan IPDN Asal Pendaftara Provinsi Kalimantan Barat	Dokumen kepegawaian para lulusan IPDN yang ditugaskan di Prov. Kalbar Tahun 2019 (dokumen)	1	17	-	-	-	1	17	-	-	100	100	-
	Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Kalbar	Terlaksananya Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Kalbar (kali)	1	1	-	-	-	1	1	-	-	100	100	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
	Penyelesaian Administrasi Diklat Pim Tk II, III dan IV dan Pelatihan Dasar serta Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepimpinan Tk II	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (orang)	-	6	-	-	-	-	6	-	-	-	100	-
	Inventarisasi dan Pemetaan Potensi PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah PNS Potensial yang mengikuti Inventarisasi dan Pemetaan Potensi (orang)	-	300	-	-	-	-	100	-	-	-	33,333	-
	Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Jabatan Fungsional	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Jabatan Fungsional (opd)	-	9	-	-	-	-	9	-	-	-	100	-
	Penyelesaian Administrasi Peninjauan Masa Kerja PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah SK Penetapan Masa Kerja (sk)	-	10	-	-	-	-	10	-	-	-	100	-
	Penyusunan Standar Kompetensi jabatan	Jumlah Dokumen SKJ (Dokumen)	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	100	-
	Penyusunan Formasi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Formasi ASN Pemprov. Kalbar(dokumen)	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	400	-
Periode 2 (Perubahan Ke-1)														
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penyusunan Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Sesuai Dengan Prosedur/Tepat Waktu (persen)	-	-	95	-	-	-	-	100	-	-	-	105
		Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Sesuai Dengan SAP	-	-	95	-	-	-	-	100	-	-	-	105

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Tugas Sesuai Standar	-	-	93	-	-	-	-	100	-	-	-	108
		Persentase Pegawai Dengan Kinerja "Baik"	-	-	98	-	-	-	-	97,56	-	-	-	99,6
		nilai Kepuasan Layanan Internal	-	-	A	-	-	-	-	A	-	-	-	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan tepat waktu (Persen)	-	-	95	-	-	-	-	100	-	-	-	105
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen)	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-	-	150
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan (Laporan)	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	100
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan yang Diverifikasi (Dokumen)	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu (Laporan)	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (Persen)	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	100
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dokumen)	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sesuai Prosedur (Persen)	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	100
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	100
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Individu (Dokumen)	-	-	80	-	-	-	-	82	-	-	-	103
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Minimal 20 JP (Orang)	-	-	19	-	-	-	-	15	-	-	-	78,9
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi (Orang)	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	100
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek (Orang)	-	-	10	-	-	-	-	10	-	-	-	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Barang (Persen)	-	-	98	-	-	-	-	100	-	-	-	102

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Item)	-	-	7	-	-	-	-	7	-	-	-	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)	-	-	10	-	-	-	-	10	-	-	-	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga (Jenis)	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Item)	-	-	30	-	-	-	-	30	-	-	-	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Jenis)	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Kunjungan Tamu yang Difasilitasi (Persen)	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali)	-	-	14	-	-	-	-	14	-	-	-	100
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang diolah (Jenis)	-	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-	100
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem yang Dikelola (Sistem Informasi)	-	-	10	-	-	-	-	10	-	-	-	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas (Persen)	-	-	95	-	-	-	-	100	-	-	-	105
	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebelair (Buah)	-	-	50	-	-	-	-	54	-	-	-	108

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Item)	-	-	7	-	-	-	-	7	-	-	-	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang Dikirim (Berkas)	-	-	50	-	-	-	-	34	-	-	-	68
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Persen)	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Dalam Kondisi Baik (Persen)	-	-	80	-	-	-	-	81,23	-	-	-	102
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang Disediakan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor / bangunan yang dipelihara (Unit)	-	-	150	-	-	-	-	150	-	-	-	100
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur	-	-	86	-	-	-	-	88,4	-	-	-	103

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
		(%)												
		Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin PNS (%)	-	-	8	-	-	-	-	-14,29	-	-	-	-179
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen formasi pengadaan dan data ASN (Dokumen)	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	100
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (dokumen)	-	-	7.000	-	-	-	-	1	-	-	-	0,01
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Peserta yang mengikuti seleksi penerimaan CASN serta seluruh rangkaian pengadaan (orang)	-	-	1	-	-	-	-	1.760	-	-	-	####
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	100
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Dewan Pengurus Korpri (Laporan)	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	100
	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN (Dokumen)	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem Informasi Kepegawaian yang Dikelola (Sistem Informasi)	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	100
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase Pengelolaan Data Kepegawaian (Persen)	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	100
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	100
	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah dokumen usulan mutasi, promosi, dan layanan administrasi ASN (Dokumen)	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	100
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Mutasi ASN (Dokumen)	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	100
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	-	-	6	-	-	-	-	6	-	-	-	100
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Promosi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas (Dokumen)	-	-	8	-	-	-	-	7	-	-	-	87,5
	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pelaksanaan peningkatan kompetensi ASN sesuai rencana pengembangan (%)	-	-	100	-	-	-	-	219,32	-	-	-	219

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Kinerja PNS Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Dokumen)	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	100
	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Kompetensi dan Potensi PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Dokumen)	-	-	200	-	-	-	-	1010	-	-	-	505
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Pelaksanaan fasilitasi administrasi penetapan calon peserta Pelatihan Kepemimpinan Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas dan Latihan Dasar CPNS di lingkungan Pemprov. Kalbar (Dokumen)	-	-	3	-	-	-	-	10	-	-	-	333
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendidikan Lanjutan PNS Tugas Belajar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Dokumen)	-	-	30	-	-	-	-	22	-	-	-	73,3
	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional (Kegiatan)	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	100
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Jabatan Fungsional (Dokumen)	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Pejabat Fungsional yang Dilakukan Pengangkatan, Pelantikan, Kenaikan, Alih Dan Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional (Orang)	-	-	400	-	-	-	-	1.273	-	-	-	318
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase aparatur berkinerja baik (%)	-	-	100	-	-	-	-	99,92	-	-	-	99,9
	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Dokumen)	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	100
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Peresentase Penyampaian Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Persen)	-	-	100	-	-	-	-	88,7	-	-	-	88,7
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah Pegawai yang diberikan penghargaan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat/Kabupaten/Kota (Orang)	-	-	400	-	-	-	-	254	-	-	-	63,5
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Dokumen Pembinaan Disiplin ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
		Barat (Dokumen)												
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah SK penyelesaian pelanggaran disiplin ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (SK)	-	-	10	-	-	-	-	8	-	-	-	80
Periode 3 (Perubahan Ke-2)														
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penyusunan Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Sesuai Dengan Prosedur/Tepat Waktu	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Sesuai Dengan SAP	-	-	-	95	100	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Tugas Sesuai Standar	-	-	-	93	96	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase Pegawai Dengan Kinerja "Baik"	-	-	-	98	100	-	-	-	-	-	-	-
		nilai Kepuasan Layanan Internal	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan tepat waktu (Persen)	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
		Persentase laporan kinerja yang disusun tepat waktu (persen)	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dokumen)	-	-	-	1	21	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan (Laporan)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	-	-	-	82	82	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	-	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (dokumen)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (dokumen)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan)	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (dokumen)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (Persen)	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (laporan)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sesuai Prosedur	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
		(Persen)												
		Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai Sesuai dengan Perencanaannya	-	-	-	90	95	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (unit)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (paket)	-	-	-	82	82	-	-	-	-	-	-	-
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (dokumen)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)	-	-	-	82	82	-	-	-	-	-	-	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan(orang)	-	-	-	20	20	-	-	-	-	-	-	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	-	-	-	11	11	-	-	-	-	-	-	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	-	-	-	20	20	-	-	-	-	-	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Barang (Persen)	-	-	-	98	100	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	-	-	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	-	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	-	-	-	14	14	-	-	-	-	-	-	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	-	-	-	30	30	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	-	-	-	3.600	3600	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (paket)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	-	-	-	16	18	-	-	-	-	-	-	-
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas (Persen)	-	-	-	95	95	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (paket)	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	-	-	-	150	150	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (unit)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (unit)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
		Disediakan (unit)												
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Dalam Kondisi Baik (Persen)	-	-	-	80	90	-	-	-	-	-	-	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (unit)	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)	-	-	-	30	30	-	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	-	-	-	150	150	-	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (unit)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi(unit)	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur (%)	-	-	-	88	90	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin PNS (%)	-	-	-	9	10	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen formasi dan pengadaan. (dokumen)	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah dokumen pemberhentian (dokumen)	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Fasilitasi Lembaga Profesi ASN (dokumen)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah data dan dokumen ASN (dokumen)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN (dokumen)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (dokumen)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (dokumen)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN (laporan)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN (dokumen)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (dokumen)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN (laporan)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (lembaga)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN (dokumen)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (dokumen)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (dokumen)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (laporan)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Mutasi PNS (Dokumen)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Pelaksanaan Promosi dan Mutasi JPT, Adminstrator, dan Pengawas (kali)	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	-	-	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
		(dokumen)												
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (laporan)	-	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (dokumen)	-	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah dokumen pelayanan administrasi dan fasilitasi peningkatan kompetensi PNS (dokumen)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah dokumen layanan administrasi, sertifikasi, dan pengembangan karir jabatan fungsional (dokumen)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (dokumen)	-	-	-	200	200	-	-	-	-	-	-	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (dokumen)	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola (dokumen)	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (dokumen)	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN (orang)	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN (laporan)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional (orang)	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional (dokumen)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN (orang)	-	-	-	30	30	-	-	-	-	-	-	-
	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional (laporan)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN (laporan)	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina (orang)	-	-	-	400	400	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional (dokumen)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional (laporan)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja PNS (kali)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		Terlaksananya pembinaan disiplin ASN (dokumen)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (dokumen)	-	-	-	10000	10000	-	-	-	-	-	-	-
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (laporan)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (orang)	-	-	-	400	400	-	-	-	-	-	-	-
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (orang)	-	-	-	8577	8755	-	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (laporan)	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (dokumen)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN (laporan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 4. Realisasi Anggaran BKD Prov. Kalbar 2018-2021

OPD	PAGU ANGGARAN				REALISASI				RASIO CAPAIAN			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BKD Prov. Kalbar	17.875.644.100	15.788.615.041	14.295.273.369	16.581.361.247	16.946.410.186	14.349.133.194	13.996.105.447	15.915.167.949	94,80	90,88	97,91	95,98

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang ingin dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Dengan berpedoman pada Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berikut ini merupakan hasil rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi Antara lain :

- a. Masih diperlukannya proses dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh kementerian khususnya terkait aturan tentang kepegawaian.
- b. Belum optimalnya penerapan manajemen talenta serta pelaksanaan sertifikasi jabatan fungsional.
- c. Belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN yang terlihat dari masih banyaknya pegawai yang belum memenuhi syarat kompetensi pegawai sesuai dengan standar kompetensi jabatans sebagai jaminan profesionalisme ASN.
- d. Masih terdapat perbedaan persepsi antara BKN dan BKD Prov. Kalbar yang menyebabkan adanya perbedaan data ASN. Selain itu proses pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan tanpa melalui sistem menyebabkan munculnya celah dalam pemutakhiran data kepegawaian yang mengakibatkan ketidakselarasan data kepegawaian dengan pelayanan kepegawaian.

- e. Terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh BKD Prov. Kalbar (anggaran dan sumber daya manusia) dalam mendorong peningkatan profesionalitas ASN baik dari sisi kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, serta disiplin

3.2. Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh BKD Provinsi Kalimantan 2024-2026, maka isu strategis yang telah dirumuskan terutama yang berkenaan dengan tugas dan fungsi BKD Provinsi Kalbar adalah :

- a. Nilai-nilai BerAkhlik sebagai *Cove Value* yang menjadi dasar penguatan budaya kerja
- b. Pembangunan assesment center dan strategi pengembangan sumber daya manusia
- c. Penerapan kebijakan manajemen talenta dalam rangka penyempurnaan penerapan sistem merit.
- d. Optimalisasi proses pelayanan kepegawaian melalui sistem layanan kepegawaian serta penyamaan persepsi pelayanan kepegawaian antara BKN dan BKD Prov. Kalbar.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam penentuan strategi, arah kebijakan, serta pelaksanaan program dan kegiatan kedepannya. Tujuan Rencana Strategis merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun.

4.1. Tujuan Jangka Menengah

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan misi RPJMD yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan yang termuat didalam Renstra BKD Provinsi Kalbar Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Tujuan dan Indikator Tujuan Tahun 2024-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja		
		2024	2025	2026
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Pelayanan Publik	Indeks Sistem Merit	326	326,5	327

- **Indeks Sistem Merit** - Penerapan sistem merit bertujuan untuk membangun bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dan mewujudkan pegawai ASN yang professional, berintegritas, netral dan berkinerja tinggi. Penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara didasari oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam

Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah dimana penilaian Indeks Sistem Merit diukur dengan menggunakan 8 (delapan) aspek sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut antara lain :

- i Aspek Perencanaan Kebutuhan (bobot 10%), yaitu ketersediaan perencanaan kebutuhan pegawai untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta diperinci menurut jumlah, jabatan, pangkat, kualifikasi, dengan mempertimbangkan pegawai yang ada dan yang akan pensiun.
- ii Aspek Pengadaan (bobot 10%), yaitu pelaksanaan pengadaan pegawai yang transparan dan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai, baik yang berasal dari calon PNS, PNS dari instansi lain, dan PPPK.
- iii Aspek Pengembangan Karir (bobot 30%), yaitu pengembangan karir meliputi penetapan standar kompetensi jabatan, pemetaan kompetensi, pembangunan *talent pool* dan rencana suksesi, serta peningkatan kompetensi dalam upaya mengatasi kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja.
- iv Aspek Promosi dan Mutasi (bobot 10%), yaitu pelaksanaan promosi, mutasi, dan rotasi secara objektif dan transparan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dengan mempertimbangkan pola karir dan rencana suksesi.
- v Aspek Manajemen Kinerja (bobot 20%), yaitu manajemen kinerja melalui penetapan kinerja yang terukur, evaluasi kinerja secara berkala dengan metode yang objektif, identifikasi kesenjangan kinerja dan penyusunan strategi untuk mengatasinya serta penggunaan hasil penilaian kinerja dalam membuat keputusan terkait promosi, mutasi, dan demosi serta pendidikan dan pelatihan.
- vi Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin (bobot 10%), yaitu penggajian dan penghargaan yang didasarkan hasil penilaian kinerja serta penegakan disiplin dan kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan kode perilaku pegawai ASN.
- vii Aspek Perlindungan dan Pelayanan (bobot 4%), yaitu perlindungan dan pelayanan kepada pegawai dalam melaksanakan tugas.

viii Aspek Sistem Informasi (bobot 6%), yaitu ketersediaan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan sistem merit dalam manajemen ASN.

4.2. Sasaran Jangka Menengah

Sasaran Renstra BKD Prov.Kalbar merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Berdasarkan rumusan rencana pembangunan daerah maka ditetapkan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun ke depan yaitu :

Tabel 6. Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan
Meningkatnya Sistem Merit	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKD Prov. Kalbar	Indeks RB	Predikat
		Nilai SAKIP	Nilai
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan BKD Prov. Kalbar	Nilai IKM	Nilai
	Meningkatnya Penerapan Manajemen Aparatur Sipil Negara	Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks

- **Indeks RB** – Pelaksanaan penerapan RB di BKD Prov. Kalbar telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dimana terdapat 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi yang dilakukan penilaian yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sdm, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Internal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah

yang dipimpin oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat selama periode satu tahun.

- **Nilai SAKIP** – Pelaksanaan penerapan SAKIP di BKD Prov. Kalbar telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat 4 (empat) komponen penilaian yang dilaksanakan yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh tim Evaluasi AKIP pada perangkat daerah Prov. Kalbar yang dipimpin oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat selama periode satu tahun.
- **Nilai IKM** – Pelaksanaan penerapan IKM di BKD Prov. Kalbar telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.terdapat 9 (sembilan) ruang lingkup unsur pelayanan yang dilakukan penilaian yaitu persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, dan penanganan pengaduan, daran, dan masukan. Pelaksanaan survei IKM dilaksanakan setiap triwulan dengan responden adalah penerima layanan yang diberikan oleh BKD Prov. Kalbar.
- **Indeks NSPK Manajemen ASN** - Penerapan Indeks Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara dilandasi oleh terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara yang bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan manajemen ASN sesuai dengan NSPK. Pelaksanaan manajemen ASN yang efektif, efisien, dan akuntabel diperlukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN merupakan keseluruhan proses penilaian terhadap implementasi Manajemen ASN

pada instansi pemerintah yang disesuaikan dengan elemen dan indikator yang telah ditetapkan dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti dokumen yang dipersyaratkan. Penilaian dilaksanakan melalui pengawasan dan pengendalian terhadap NSPK manajemen ASN dilaksanakan menggunakan 2 (dua) metode yakni metode preventif dan metode represif. Metode preventif dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek), konsultasi, monitoring dan evaluasi melalui pemanfaatan sistem informasi Wasdal. Sementara metode represif dilakukan melalui audit manajemen ASN yang meliputi audit reguler dan audit investigatif.

Pengawasan dan Pengendalian tidak hanya dilakukan untuk menemukan pelanggaran yang terjadi, namun juga sebagai bahan evaluasi dalam menentukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan manajemen aparatur sipil negara

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian Provinsi Kalimantan Barat telah merumuskan strategi dan arah kebijakan yaitu :

5.1. Strategi

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah / perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Strategi diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan serta sebagai rujukan dari kebijakan yang akan diambil dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintah urusan kepegawaian. Beberapa strategi yang telah ditetapkan yaitu :

- a. Pembangunan lembaga/unit assesment center dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia.
- b. Penerapan kebijakan manajemen talenta dalam rangka penyempurnaan penerapan sistem merit.
- c. Pengembangan layanan administrasi dan informasi kepegawaian berbasis elektronik.
- d. Peningkatan Kualitas Penyusunan, Penetapan Kebutuhan, Pengadaan dan Pengangkatan PNS.
- e. Penerapan Kebijakan Pola Karir Berbasis Sistem Merit.
- f. Penerapan Manajemen Kinerja secara Objektif.
- g. Peningkatan Pemberian Penghargaan dan Sanksi.
- h. Peningkatan kesejahteraan melalui kebijakan penggajian, tunjangan dan fasilitas.
- i. Penerapan kode etik dan perlindungan bagi ASN.

5.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis strategis daerah / perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Adapun arah kebijakan yang telah disusun antara lain :

- a. Penyusunan kajian pembangunan assesment center.
- b. Pelaksanaan pemetaan kompetensi untuk seluruh pegawai secara bertahap.
- c. Penyusunan, penyempurnaan, dan Penerapan kebijakan manajemen talenta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- d. Optimalisasi Penerapan layanan administrasi dan informasi kepegawaian berbasis elektronik.
- e. Penyamaan persepsi data kepegawaian antara OPD, BKD, dan Instansi Pusat.
- f. Penyusunan Peraturan Gubernur terkait Penyusunan, Penetapan Kebutuhan dan Pengadaan ASN.
- g. Penyusunan Pola Karir PNS di Lingkungan Pemprov Kalbar.
- h. Monev Penilaian Kinerja PNS di Lingkungan Pemprov Kalbar.
- i. Penyusunan Kebijakan Pemberian Penghargaan dan Sanksi.
- j. Peningkatan Layanan dalam Pemberian Penghargaan.
- k. Peningkatan Penerapan Sanksi dalam Penegakan Pelanggaran Disiplin.
- l. Penyusunan Regulasi terkait Manajemen Kesejahteraan ASN.
- m. Penyusunan Perubahan Regulasi Kode Etik ASN sesuai dengan ASN BerAkhhlak.
- n. Sosialisasi dan Monitoring Penerapan Regulasi kode etik dan perlindungan ASN.

BAB VI

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan perangkat daerah guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk dapat mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan.

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan perwujudan langkah yang diambil untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan Program, kegiatan, dan sub kegiatan telah menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Program Kepegawaian Daerah

1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Selanjutnya rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator, target, dan usulan pendanaan disusun sesuai dengan **lampiran 1** Dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

BKD Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan 4 (empat) indikator kinerja utama yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang yaitu :

Tabel 7. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	Kondisi	Target Kinerja Tahun			Kondisi
	Awal	2024	2025	2026	Akhir
Indeks RB	BB	BB	A	A	A
Nilai SAKIP	80,6	81	81,5	82	82
Nilai IKM	84,3	85	86	87	90
Indeks NSPK Manajemen ASN	87	88	89	90	90

- **Indeks RB** – capaian Indeks Reformasi Birokrasi BKD Prov. Kalbar tahun 2022 adalah 74,01% dengan predikat BB. Adanya perubahan dalam mekanisme penilaian RB yang akan dimulai pada tahun 2023 memungkinkan adanya penurunan atau kenaikan terhadap penilaian RB BKD. Prov. Kalbar. Namun hingga dokumen ini disusun belum ada konfirmasi pasti dari Inspektorat Prov. Kalbar terhadap mekanisme yang akan digunakan dalam penilaian RB di tahun mendatang.
- **Nilai SAKIP** - capaian Nilai SAKIP BKD Prov. Kalbar tahun 2022 adalah 80,6 dengan predikat A. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja BKD Prov. Kalbar menunjukkan hasil yang memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel. Namun beberapa catatan berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan terdapat beberapa komponen penilaian yang harus diperbaiki kedepannya dalam rangka peningkatan penerapan implementasi SAKIP secara berkelanjutan.
- **Nilai IKM** – capaian IKM BKD Prov. Kalbar tahun 2022 berada pada angka 84,3 dengan total responden 255 (duaratus lima puluh lima) orang yang mengartikan mutu pelayanan dan kinerja pelayanan BKD Prov. Kalbar dikategorikan sangat baik. Namun kinerja dan komitmen tersebut masih harus ditingkatkan serta diperlukan peran serta berbagai pihak dalam memberikan masukan yang netral dan tidak bersifat apatis terhadap upaya perbaikan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang prima bagi pengguna layanan kedepannya.
- **Indeks NSPK Manajemen ASN** – capaian Indeks NSPK Manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar memiliki nilai 87 pada tahun 2022. Hal tersebut menandakan Pemprov Kalbar memiliki kategori A dengan predikat Unggul. Prioritas yang diberikan bagi pemerintah provinsi yang memiliki kategori tersebut yaitu prioritas dalam pelayanan kepegawaian oleh BKN, prioritas pelaksanaan uji kompetensi, prioritas pendampingan dalam pengintegrasian sistem informasi kepegawaian instansi dalam SIASN; dan terintegrasi dengan salah satu komponen dalam penilaian reformasi birokrasi. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 12 Tahun 2022 tentang Indeks dan Penilaian Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara, terdapat 18 (delapan belas) elemen dalam penilaian indeks NSPK yang meliputi :
 1. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN;

2. Pengadaan ASN;
3. Pengangkatan ASN;
4. Pangkat;
5. Mutasi;
6. Jabatan;
7. Pengembangan Karir ASN;
8. Pola Karier;
9. Penggajian, Tunjangan dan Fasilitas;
10. Penghargaan;
11. Jaminan Pensiun dan Hari Tua;
12. Perlindungan.
13. Penilaian Kinerja;
14. Cuti;
15. Kode Etik;
16. Disiplin;
17. Pemberhentian; dan
18. Pensiun.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia selaku instansi pemerintah yang berwenang melaksanakan penilaian terhadap NSPK Manajemen ASN yang dilaksanakan oleh Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian serta Kepala Kantor Regional BKN. Penilaian menggunakan Aplikasi Indeks NSPK Manajemen ASN yang juga terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN (SIASN). Pelaksanaan penilaian oleh BKN dilaksanakan melalui tahapan perispan, pengolahan, pengumuman, dan evaluasi pada masing-masing indikator elemen dimana indikator tersebut dapat berubah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan salah satu pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dalam kurun waktu (tiga) tahun, untuk kemudian dijabarkan ke dalam Rencana (Rencana Kerja) setiap tahunnya. Selain itu, dokumen Renstra Perangkat Daerah juga digunakan sebagai dasar pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan.

Renstra Perangkat Daerah BKD Provinsi Kalbar Tahun 2024-2026 ini disusun dengan memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diharapkan mampu mendukung pencapaian pembangunan daerah dalam urusan kepegawaian sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Tahun 2024-2026.

Demikian Renstra Perangkat Daerah BKD Provinsi Kalbar Tahun 2024-2026 ini disusun, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif didalam upaya membangun Provinsi Kalimantan Kalimantan Barat.

Lampiran 1. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
					2024		2025		2026		Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik	Meningkatnya Penerapan Manajemen Aparatur Sipil Negara	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN sesuai Formasi / Kebutuhan	60	2.960.000.000	65	3.129.500.000	70	3.276.425.000	70	3.276.425.000
				Persentase ASN yang dilakukan pengembangan	90	1.915.000.000	90	1.958.000.000	90	2.074.000.000	90	2.074.000.000
				Persentase Peningkatan Kinerja dan Disiplin ASN	90	698.000.000	92	760.000.000	95	847.000.000	95	847.000.000
		5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pemenuhan formasi Pengadaan ASN	90	620.000.000	90	630.000.000	90	640.000.000	90	640.000.000
				Persentase Layanan Pemberhentian ASN	100	190.000.000	100	190.000.000	100	190.000.000	100	190.000.000
				Persentase Pengelolaan data dan Informasi ASN	100	850.000.000	100	950.000.000	100	1.020.000.000	100	1.020.000.000
		5.03.02.1.01.01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN (dokumen)	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
					2024		2025		2026		Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (dokumen)	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000
		5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (dokumen)	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000
		5.03.02.1.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN (laporan)	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000
		5.03.02.1.01.05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN (dokumen)	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000
		5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (dokumen)	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
		5.03.02.1.01.07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN (laporan)	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
					2024		2025		2026		Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (lembaga)	1	200.000.000	1	250.000.000	1	270.000.000	1	270.000.000
		5.03.02.1.01.09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN (dokumen)	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000
		5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (dokumen)	1	390.000.000	1	400.000.000	1	410.000.000	1	410.000.000
		5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (dokumen)	100	150.000.000	100	170.000.000	100	190.000.000	100	190.000.000
		5.03.02.1.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (laporan)	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000
		5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Pengelolaan Mutasi PNS	90	150.000.000	90	150.000.000	90	150.000.000	90	150.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
					2024		2025		2026		Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
				Persentase pengelolaan kenaikan pangkat, gaji berkala, peningkatan pendidikan, peninjauan masa kerja, dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat	95	330.000.000	95	379.500.000	95	436.425.000	95	436.425.000
				Persentase Pelaksanaan Promosi dan Mutasi JPT, Adminstrator, dan Pengawas	85	820.000.000	88	830.000.000	90	840.000.000	90	840.000.000
		5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah (dokumen)	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
		5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (laporan)	6	330.000.000	6	379.500.000	6	436.425.000	6	436.425.000
		5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (dokumen)	8	820.000.000	8	830.000.000	8	840.000.000	8	840.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
					2024		2025		2026		Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang diberikan layanan administrasi kompetensi	90	1.485.000.000	90	1.498.000.000	90	1.509.000.000	90	1.509.000.000
				Persentase ASN yang diberikan pelayanan administrasi dan pembinaan Jabatan Fungsional	90	430.000.000	90	460.000.000	90	565.000.000	90	565.000.000
		5.03.02.1.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)	200	45.000.000	200	48.000.000	200	52.000.000	200	52.000.000
		5.03.02.1.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (dokumen)	4	253.000.000	4	256.000.000	4	258.000.000	4	258.000.000
		5.03.02.1.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (dokumen)	2	642.000.000	2	644.000.000	2	645.000.000	2	645.000.000
		5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola (dokumen)	4	490.000.000	4	493.000.000	4	495.000.000	4	495.000.000
		5.03.02.1.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (dokumen)	1	55.000.000	1	57.000.000	1	59.000.000	1	59.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
					2024		2025		2026		Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		5.03.02.1.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN (orang)	0	-	0	-	3	30.000.000	3	30.000.000
		5.03.02.1.03.07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN (laporan)	0	-	0	-	3	25.000.000	3	25.000.000
		5.03.02.1.03.08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional (orang)	10	100.000.000	10	100.000.000	10	120.000.000	10	120.000.000
		5.03.02.1.03.09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional (dokumen)	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000
		5.03.02.1.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN (orang)	80	20.000.000	90	25.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000
		5.03.02.1.03.11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional (laporan)	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
					2024		2025		2026		Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		5.03.02.1.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN (laporan)	2	70.000.000	2	80.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000
		5.03.02.1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina (orang)	500	60.000.000	500	65.000.000	500	70.000.000	500	70.000.000
		5.03.02.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional (dokumen)	400	120.000.000	500	130.000.000	600	140.000.000	600	140.000.000
		5.03.02.1.03.15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional (laporan)	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000
		5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penyampaian laporan kinerja ASN	90	128.000.000	92	120.000.000	95	127.000.000	95	127.000.000
				Persentase ASN yang akan diusulkan untuk mendapatkan penghargaan	90	155.000.000	100	175.000.000	100	195.000.000	100	195.000.000
				Persentase Penanganan pelanggaran disiplin ASN	90	415.000.000	100	465.000.000	100	525.000.000	100	525.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
					2024		2025		2026		Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		5.03.02.1.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (dokumen)	1	15.000.000	0	-	0	-	0	-
		5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (dokumen)	4	83.000.000	4	85.000.000	4	87.000.000	4	87.000.000
		5.03.02.1.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (laporan)	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000
		5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (orang)	5	70.000.000	5	80.000.000	5	90.000.000	5	90.000.000
		5.03.02.1.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (orang)	410	65.000.000	420	75.000.000	430	85.000.000	430	85.000.000
		5.03.02.1.04.06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur (dokumen)	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
					2024		2025		2026		Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (orang)	9030	170.000.000	9040	200.000.000	9060	230.000.000	9060	230.000.000
		5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (laporan)	12	150.000.000	14	160.000.000	16	180.000.000	16	180.000.000
		5.03.02.1.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (dokumen)	15	50.000.000	15	55.000.000	15	60.000.000	15	60.000.000
		5.03.02.1.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN (laporan)	1	45.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penyusunan Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Sesuai Dengan Prosedur/Tepat Waktu	100	119.000.000	100	129.000.000	100	141.000.000	100	141.000.000
Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Sesuai Dengan SAP				100	10.800.000.000	100	11.125.000.000	100	11.345.000.000	100	11.345.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
					2024		2025		2026		Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Tugas Sesuai Standar	100	900.000.000	100	903.000.000	100	1.206.000.000	100	1.206.000.000
				Persentase Pegawai Dengan Kinerja "Baik"	95	225.000.000	98	188.000.000	100	221.000.000	100	221.000.000
				nilai Kepuasan Layanan Internal	A	769.000.000	A	921.000.000	A	973.000.000	A	973.000.000
		5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan tepat waktu (Persen)	100	74.000.000	100	80.000.000	100	88.000.000	100	88.000.000
				Persentase laporan kinerja yang disusun tepat waktu (persen)	100	45.000.000	100	49.000.000	100	53.000.000	100	53.000.000
		5.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	1	18.000.000	1	19.000.000	2	22.000.000	2	22.000.000
		5.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	1	16.000.000	1	17.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
					2024		2025		2026		Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		5.03.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000
		5.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000
		5.03.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.000.000	1	24.000.000
		5.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	3	20.000.000	3	22.000.000	3	24.000.000	3	24.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
					2024		2025		2026		Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		5.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	4	25.000.000	4	27.000.000	4	29.000.000	4	29.000.000
		5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan (Laporan)	2	10.800.000.000	2	11.125.000.000	2	11.345.000.000	2	11.345.000.000
		5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	80	10.500.000.000	81	10.800.000.000	82	11.000.000.000	82	11.000.000.000
		5.03.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	0	-	0	-	1	15.000.000	1	15.000.000
		5.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	12	220.000.000	12	230.000.000	12	240.000.000	12	240.000.000
		5.03.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (dokumen)	0	-	1	10.000.000	0	-	0	-

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
					2024		2025		2026		Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		5.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000
		5.03.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (dokumen)	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000
		5.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan)	4	60.000.000	4	62.000.000	4	64.000.000	4	64.000.000
		5.03.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (dokumen)	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000
		5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (Persen)	100	34.000.000	100	55.000.000	100	41.000.000	100	41.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
					2024		2025		2026		Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		5.03.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000
		5.03.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	0	-	1	8.000.000	0	-	0	-
		5.03.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (laporan)	0	-	0	-	1	4.000.000	1	4.000.000
		5.03.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	0	-	1	10.000.000	0	-	0	-
		5.03.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	0	-	1	4.000.000	0	-	0	-

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
					2024		2025		2026		Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		5.03.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	1	25.000.000	1	27.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000
		5.03.01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	1	4.000.000	0	-	0	-	0	-
		5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sesuai Prosedur (Persen)	100	190.000.000	100	147.000.000	100	174.000.000	100	174.000.000
				Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai Sesuai dengan Perencanaannya	100	35.000.000	100	41.000.000	100	47.000.000	100	47.000.000
		5.03.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (unit)	1	50.000.000	0	-	0	-	0	-
		5.03.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (paket)	80	80.000.000	81	81.000.000	82	82.000.000	82	82.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
					2024		2025		2026		Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		5.03.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000
		5.03.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (dokumen)	0	-	0	-	1	20.000.000	1	20.000.000
		5.03.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)	80	5.000.000	81	6.000.000	82	7.000.000	82	7.000.000
		5.03.01.1.05.06	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	15	20.000.000	15	22.000.000	19	24.000.000	19	24.000.000
		5.03.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	11	5.000.000	11	7.000.000	11	9.000.000	11	9.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
					2024		2025		2026		Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		5.03.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	20	10.000.000	20	12.000.000	20	14.000.000	20	14.000.000
		5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penuhuan Barang (Persen)	100	769.000.000	100	921.000.000	100	973.000.000	100	973.000.000
		5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	7	25.000.000	7	30.000.000	7	35.000.000	7	35.000.000
		5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	8	180.000.000	10	190.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000
		5.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	12	90.000.000	12	110.000.000	12	130.000.000	12	130.000.000
		5.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	12	60.000.000	12	80.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
					2024		2025		2026		Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	30	140.000.000	30	145.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000
		5.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (dokumen)	3600	24.000.000	3600	26.000.000	3600	28.000.000	3600	28.000.000
		5.03.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (paket)	0	-	1	50.000.000	0	-	0	-
		5.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000
		5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	16	140.000.000	16	160.000.000	16	180.000.000	16	180.000.000
		5.03.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
					2024		2025		2026		Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		5.03.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000
		5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas (Persen)	100	310.000.000	100	220.000.000	100	440.000.000	100	440.000.000
		5.03.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (paket)	30	100.000.000	0	-	30	110.000.000	30	110.000.000
		5.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	15	160.000.000	15	170.000.000	15	180.000.000	15	180.000.000
		5.03.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (unit)	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000
		5.03.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (unit)	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
					2024		2025		2026		Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		5.03.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	0	-	1	50.000.000	0	-	0	-
		5.03.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	2	50.000.000	0	-	2	50.000.000	2	50.000.000
		5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	356.000.000	100	368.000.000	100	430.000.000	100	430.000.000
		5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	1	25.000.000	1	27.000.000	1	29.000.000	1	29.000.000
		5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
					2024		2025		2026		Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		5.03.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000
		5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	1	330.000.000	1	340.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000
		5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Dalam Kondisi Baik (Persen)	95	200.000.000	97	260.000.000	100	295.000.000	100	295.000.000
		5.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (unit)	3	50.000.000	3	60.000.000	3	70.000.000	3	70.000.000
		5.03.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)	20	20.000.000	0	-	10	15.000.000	10	15.000.000
		5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	150	110.000.000	150	120.000.000	150	130.000.000	150	130.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
					2024		2025		2026		Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		5.03.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	0	-	0	-	1	30.000.000	1	30.000.000
		5.03.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (unit)	0	-	1	40.000.000	0	-	0	-
		5.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	0	-	0	-	1	40.000.000	1	40.000.000
		5.03.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	0	-	1	40.000.000	0	-	0	-
		5.03.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	5	20.000.000	0	-	2	10.000.000	2	10.000.000